

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan Skala Predikat PKO yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)
Tingkat Capaian Kinerja

No.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)
1.	$X \geq 100\%$	Istimewa
2.	$80\% < X \leq 100\%$	Baik
3.	$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perbaikan
4.	$20\% < X \leq 60\%$	Kurang
5.	$0\% \leq X \leq 20\%$	Sangat Kurang

Sumber Data : Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024

Penentuan Predikat PKO Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi juga dapat mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atas entitas Akuntabilitas Kinerja yang dinilai. Selanjutnya setiap Predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian Kinerja Organisasi.

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil predikat penilaian kinerja terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2026;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2026 ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran Perangkat daerah, dapat dijelaskan pada tabel tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	96,60	n/a

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Persentase	97,40	30
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Persentase	90,10	30
		2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	Persentase	93,30	30
		3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	80-100	30
		4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	80-100	30
		5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase	80-100	30
3	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas	Persentase Target Tujuan dengan	Persentase	100	30

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026	Realisasi Kinerja Tahun 2026
1	2	3	4	5	6
	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah			
4	Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	30

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Dalam melaksanakan program kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 telah berjalan baik dan lancar. Adapun capaian keberhasilan antara lain :

- a) Terlaksananya program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;
- b) Tersedianya dokumen perencanaan yaitu RKPD Tahun 2027 dan RKPD Perubahan Tahun 2026, RENJA Tahun 2027 dan Renja Perubahan Tahun 2026.

Dalam melaksanakan program kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026 telah berjalan baik dan lancar. Adapun capaian keberhasilan antara lain :

- c) Terlaksananya program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;
- d) Tersedianya dokumen perencanaan yaitu Rancangan RKPD Tahun 2027, draf Rancangan Awal RENJA Tahun 2027.
- e) Nilai SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mendapat Predikat A dengan Nilai 88,11.

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	96,60	n/a
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Persentase	97,40	30
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Persentase	90,10%	30
		2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	Persentase	93,30%	30
		3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	80%- 100%	30

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
		4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	80%-100%	30
		5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase	80%-100%	30
3	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	30
4	Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	30

3.1.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	n/a	n/a	n/a	n/a
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Persentase	100%	100%	30%	31%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2026	
				Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Persentase	100%	100%	30%	33%
		2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	Persentase	100%	100%	30%	32%
		3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100%	100%	30%	38%
		4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100%	100%	30%	38%
		5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase	100%	100%	30%	38%
3	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Terget dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	30%	30%
4	Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	30%	30%

3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Bappeda dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

No	Sasaran				Indikator				Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
	Renstra		Renja		Renstra		Renja		Renstra		Renja		Renstra		Renja	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
1.	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan	Persentase antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Persentase antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Persentase antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	Persentase antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	97,35%	97,40%	97,35%	97,40%	100%	30%	100%	30%
2.	Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	90,05%	90,10%	90,05%	90,10%	100%	30%	100%	30%
					2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	93,25%	93,30%	93,25%	93,30%	100%	30%	100%	30%
					3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	80%-100%	80%-100%	80%-100%	80%-100%	100%	30%	100%	30%
					4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	80%-100%	80%-100%	80%-100%	80%-100%	100%	30%	100%	30%

No	Sasaran				Indikator				Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
	Renstra		Renja		Renstra		Renja		Renstra		Renja		Renstra		Renja	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
					5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	80%-100%	80%-100%	80%-100%	80%-100%	100%	30%	100%	30%
3	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	30%	100%	30%
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	30%	100%	30%

3.1.4 Menindaklanjuti Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Tahun 2025 dengan predikat nilai 96,55 (Sembilan puluh enam koma lima puluh lima) berada pada kategori Sangat Tinggi, dan Realisasi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Tahun 2025 dengan predikat belum ada penilaian dari Kementerian PPN/Bappenas. Capaian ini menunjukkan kualitas perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi dan melampaui standar nasional. Ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memperkuat perencanaan berbasis *outcome*, meningkatkan integrasi perencanaan dan penganggaran, serta mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi untuk menjaga konsistensi capaian.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam penyusunan strategi ini digunakan metode analisa *Strenght Weakness Opportunity Threat* (SWOT) yang mengkombinasikan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, kekuatan pada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Tersedianya sistem aplikasi yang didukung jaringan internet yang memadai;
- b. Tersedianya Pejabat Fungsional Perencana dan Fungsional Analis Kebijakan;
- c. Motivasi kerja yang berdedikasi tinggi dalam pelaksanaan tugas;
- d. Sarana dan Prasarana kerja yang memadai;
- e. Telah mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta (KSP); dan

Disamping kekuatan tersebut di atas, masih terdapat beberapa kelemahan di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Belum terpenuhinya kuantitas SDM berdasarkan Analisis Jabatan di Bappeda.

- b. Belum optimalnya kualitas SDM Perencana di Bappeda;
- c. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi berbagai sumber- sumber pendanaan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan;
- d. Belum optimalnya ketersediaan data sektoral sebagai dasar penyusunan perencanaan;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan;
- f. Belum optimalnya perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah; dan
- g. Belum optimalnya tahapan penyusunan RKPD.

Adapun peluang yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

- a. Peran perencanaan yang semakin strategis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Banyaknya minat berbagai pihak (NGO, ICRAF, BUMN, dan Swasta) untuk melakukan kerja sama pembangunan di Sumatera Selatan;
- c. Perkembangan teknologi komunikasi informasi (ICT) yang mempermudah perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- d. Komitmen Kepala Daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas; dan
- e. Kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan /Diklat untuk meningkatkan kualitas SDM Bappeda.

Selain peluang yang dimiliki, beberapa ancaman juga perlu menjadi perhatian antara lain:

- a. Adanya kebijakan Mutasi ASN yang keluar dari Bappeda;
- b. Adanya kebijakan *Refocusing* Anggaran;
- c. Pesatnya perkembangan Teknologi dan Informasi untuk mendukung Perencanaan Pembangunan; dan
- d. Belum optimalnya komitmen dan pemahaman perangkat daerah dan Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang dimiliki, maka ditetapkan formulasi strategi untuk perumusan dan kegiatan prioritas Bappeda sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perumusan Strategi

No	Telaah	Perumusan Isu Strategis
1	Belum optimalnya pemahaman SDM perencana dalam merencanakan pembangunan yang sejalan dengan nasional dan daerah	Mengoptimalkan Kapasitas SDM Perencana untuk Meningkatkan Standar Mutu Perencanaan dan Pembangunan
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung proses penyusunan dokumen perencanaan	Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung proses perencanaan
2	Capaian kinerja BAPPEDA Sumsel pada Tahun 2019-2023, sebagian besar target kinerja telah tercapai, bahkan terdapat beberapa indikator kinerja yang melampaui target. Indikator yang belum mencapai target yaitu indikator kinerja Tahun 2020 yaitu RKPD Tepat Waktu.	
	Belum optimalnya kualitas substansi perencanaan	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota
	Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk melakukan pembangunan di Sumatera Selatan	Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang melibatkan lintas sektor
	Belum optimalnya tahapan penyusunan RKPD yang tepat waktu dan sesuai standar	Mengoptimalkan proses penyusunan Rankhir RKPD Provinsi sesuai dengan kalender perencanaan
	Belum optimalnya penyampaian laporan triwulanan OPD Tepat Waktu	Mengoptimalkan kualitas pengendalian kegiatan perangkat daerah
	Belum optimalnya Kabupaten/Kota yang mengajukan fasilitasi RKPD tepat waktu	Meningkatkan kualitas fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2026

Tingkat Efisiensi dapat dirumuskan yaitu Tingkat Efisiensi = Persentase Capaian Kinerja dibagi Persentase Realisasi Anggaran dikali 100. Dan tingkat interpretasi yaitu sangat efisien : $\geq 100\%$, dan efisien : 100% , serta kurang efisien : $\leq 100\%$.

Adapun analisis efisiensi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		n/a	n/a	n/a
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	1. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	31,00%	30,00%	30,80%
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN 2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPd dengan RKP 3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd	1. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	33,00% 32,00% 38,00%	30,00% 30,00% 30,00%	33,29% 31,94% 37,50%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
		4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		38,00%	30,00%	37,50%
		5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD		38,00%	30,00%	37,50%
3	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	1. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	30,00%	30,00%	30,00%
			2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.			
4	Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan	30,00%	30,00%	30,00%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada triwulan I Tahun 2026, dapat diperoleh tingkat efisiensi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yaitu “Kurang Efisien” sesuai tabel diatas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara efisien karena target kinerja tercapai optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2026

Analisis pencapaian pernyataan kinerja yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator indeks perencanaan pembangunan daerah (IPPD) yang didukung oleh program/kegiatan, dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program yang Menunjang Keberhasilan	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran Program
1	2	3	4	5	6
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		n/a	n/a
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah	1. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	31%	30%
			2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	https://drive.google.com/file/d/1MTd-zp0FNLEku3skjdm lidsuSZ3M6PRr/view?usp=sharing	30%
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN	1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	33%	30%
		2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	32%	30%
		3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		38%	30%
		4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		38%	30%

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program yang Menunjang Keberhasilan	Persentase Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran Program
1	2	3	4	5	6
		5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD		38%	30%
3	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Target dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	1. Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	30%	30%
			2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		30%
4	Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan	30%	30%

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 ditargetkan nilai sebesar 96,55 dan tercapai sebesar 96,55 dan untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026 ditargetkan sebesar 96,60 dan tercapai sebesar n/a%. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah yang didukung oleh pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara optimal.

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran, penguatan monitoring dan evaluasi triwulan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM perencana turut berkontribusi terhadap kualitas substansi dokumen perencanaan.

Untuk kedepannya, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan terus memperkuat integrasi perencanaan berbasis kinerja dan *outcome* guna mempertahankan serta meningkatkan capaian indeks secara berkelanjutan.

3.2 Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Pada Tahun Anggaran 2026, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.36.242.247.801,00. Dari jumlah tersebut, pada triwulan I (satu) terealisasi sebesar Rp.6.402.359.174,00 atau 17,67% fisik kegiatan 27,51 %. Dapat dijelaskan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2026

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	34,357.577.234.00	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	0,95	12,92	6.399.199.074	18,63	51,72	18,29
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.800.000.00	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang	85%	0.14	0.00	0.00	0,00	90.00	0,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	0,02	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.800.000.00	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	0,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000.00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000.00	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.000.000.00	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.000.000.00	Jumlh Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		0,04	0,00	0,00	0,70	0,03
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000.00	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerka Perangkat Daerah	1 Laporan		0,04	0,00	0,00	70,00	0,03
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.712.485.236.00	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	87,50	13,89	6.086.613.953.00	19,19	20,00	17,34
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.425.685.236,00	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	157 orang/bulan	86,71	13,76	6.086.613.953.00	19,37	20.00	17,34
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	184,200,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen	0.51	33,33	0.00	00,0	0.00	0.00
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80.000.000.00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	0.22	23,80	0.00	0.00	0,00	0.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.600.000.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	0,05	6,02	0.00	0,00	0,00	0.00
12.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.000.000,00			0.02	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.800.000.00	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	0.22	0.00	31.999.844.00	39,60	100.00	0,00
13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	48.800.000.00	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0.13	0.00	0.00	0,00	0.00	0.12
14	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	32,000,000.00	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0.09	100.00	31.999.844.00	100,00	100.00	0.09
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.325.860.00	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	85%	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	43.650.000,00	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0.12	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	40,000,000.00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0.11	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
17	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25,900,000.00	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang	0.07	0.00	0.00	0,00	0.00	0.0
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16,775,860.00	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	0.05	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	829.2000.000.00	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	2.29	0.00	52.590.153.00	6,34	10,94	0,00
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	40,000,000.00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0.11	0.00	6.190.000.00	15,48	15,50	0.02

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.500.000.00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0.21	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163.400,000.00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket	0,45	0.00	11.344.40000	6,94	7,00	0,03
22	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	35.300,000.00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	0.10	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000,00	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan yang disediakan	4 Dokumen	0.02	0.00	-	0.00	0.00	0.00
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	0.94	0.00	35.055.753,00	10,31	10,31	0,10
25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	90.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0.25	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	78.000,000.00	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	0.22	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.237.566.138.00	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100,00%	3,41	2,83	165.960.624,00	13,41	19,19	
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0.01	0.00	1.000.000.00	31,25	31,25	0.00
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	735.166.138.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.03	2,04	111.629.624,00	15,18	15,20	0,31
29	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0.06	0.00	0.00	0,0	0,00	0.00
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	479.200.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,32	4,17	53.331.000,00	11,13	11,13	0,15

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	319.400.000.00	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	85%	0.88	0.00	62.034.500,00	19,42	18,50	0.00
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.800.000.00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	0.27	0.00	7.564.500,00	7,81	8.00	0,02
32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.600.000.00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit	0.26	0.00	17.470.000.00	18,47	17,50	0,05
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.000.000.00	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0.35	0.00	37.000.000,00	28,91	29.00	0.10
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	906.695.786.00	Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	95%	2,50	0.00	3.160.100,00	0,35	3,30	0.01

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	363.485.986.00	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	88%	1.00	0.00	3.160.100,00	0,87	3,30	0,00
34	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	96,925.986.00	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah	2 Berita Acara	0,27	0.00	3.160.100.00	3,26	3,30	0,01
35	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	178.000.000.00	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	0,49	0.00	0.00		0.00	0,00
36	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	88.560.000.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	0,24	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	172.808.000.00	Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis	88%	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
37	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	73.828.000.00	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	0.20	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00
38	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	98.980.000.00	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	370.401.800.00	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%	81%	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	17.400.000.00	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	28.001.800,00	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	0.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
41	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	94.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	231,000.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	5 Dokumen	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	978,174,781.00	Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen	100,00%	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	417,878,300.00	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	82,00%	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	34.960.768,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
44	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	86.289.400,00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100.926.965,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	195.701.167,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	279.840.288,00	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	82%	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD)	79.311.228,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian	33.375.878,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0.09	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	95.649.240,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	14.823.390.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
51	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	12.774.304.00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	43.906.248.00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	280.456.193,00	Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	82%	0,77	0,00	4.740.000.00	0,00	0,00	0,00
53	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.644.600.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
			(RPJPD, dan RKPD / Renja)							
54	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.000.000,00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	28.620.000,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	44.502.000,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/ RPJMN pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
57	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	80.450.239.00	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	21.663.500,00	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	22.142.400,00	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Keilayahan	1 Laporan	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Bobot (%)	Target Keuangan (%)	Realisasi			Tertimbang Fisik
							Keuangan		Fisik	
							(Rp)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6 = (3/Pagu APBD)	7	8	9	10	11
60	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	39.433.454,00	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan Renstra/RPD/RPJPD/RKP/ RPJMN pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah 3 Program 13 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan	36.242.247.801,00			100.00	12,25	6.402.359.174,00	17,67	27,51	18,30

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Bappeda Provinsi Sumatera Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama periode Januari sampai dengan Maret Tahun Anggaran 2026. Laporan ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcome*), sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK). Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan dan pengendalian RKPD, fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data perencanaan, penyusunan laporan kinerja.

Capaian kinerja pada Triwulan I menunjukkan bahwa sebagian besar indikator masih berada pada tahap awal pelaksanaan karena karakteristik kegiatan perencanaan yang umumnya berfokus pada proses penyusunan dokumen, koordinasi lintas perangkat daerah, sinkronisasi program dan kegiatan, serta pengumpulan data sebagai dasar pelaksanaan pembangunan pada triwulan berikutnya. Oleh karena itu, realisasi fisik maupun capaian beberapa indikator kinerja belum sepenuhnya mencerminkan hasil akhir yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterlambatan penyampaian data dan dokumen, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan penyusunan dokumen perencanaan. Kendala tersebut menjadi perhatian penting agar tidak memengaruhi pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya.

Sebagai langkah perbaikan, Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, mempercepat penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan, meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIPD sebagai instrumen utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, penguatan implementasi SAKIP akan terus dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi secara berkesinambungan.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan target indikator kinerja utama, termasuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan **Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)**, dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, Bappeda diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

LKjIP Triwulan I ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dan seluruh unit kerja dalam melakukan pengendalian kinerja serta penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya. Evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja instansi, serta mendorong terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang semakin efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Triwulan I, beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas kinerja pada triwulan berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan, penyampaian, serta validasi data perencanaan dan data kinerja agar informasi yang dihasilkan lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi program, kegiatan, subkegiatan, serta capaian indikator kinerja sehingga potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih dini.

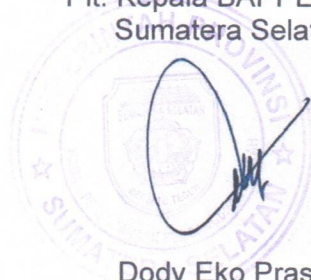
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam mengatasi kendala teknis maupun penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan nomenklatur.
4. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan di bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan data, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, serta implementasi SAKIP agar kualitas perencanaan dan pelaporan semakin baik.
5. Memperkuat penerapan manajemen risiko dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program sehingga potensi hambatan terhadap pencapaian target dapat diantisipasi secara lebih efektif.
6. Mendorong pemanfaatan data sektoral, data statistik, dan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pengambilan keputusan sehingga pembangunan daerah semakin berbasis data (*evidence-based planning*).
7. Melakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II, III, dan IV agar target indikator kinerja utama, target kinerja organisasi, tingkat serapan anggaran, serta Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan adanya evaluasi dan rekomendasi tersebut, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya dapat berlangsung lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bappeda Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, memperkuat implementasi SAKIP, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan I Tahun 2026 Bappeda Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

Palembang, 2026

Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi
Sumatera Selatan,



Dody Eko Prasetyo, ST., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 198712122010011002